

Framework Cobit 5 untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (Studi Kasus: Diskominfo Kota Palopo)

Cobit 5 Framework for Information Technology Governance Audit (Case Study: Diskominfo Palopo City)

Andi Nurlinda Thamrin¹⁾, Kusri²⁾, Rismayani³⁾

^{1,2}Magister Teknik Informatika Universitas Amikom, Yogyakarta

³Program Studi Teknik Informatika STMIK Dipanegara Makassar, Makassar

^{1,2}Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

³Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km.9, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

andin.1202@students.amikom.ac.id¹⁾, kusri@amikom.ac.id²⁾, rismayani@dipanegara.ac.id³⁾

Diterima : 21 Juni 2021 || Revisi : 18 Oktober 2021 || Disetujui: 30 Oktober 2021

Abstrak – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palopo merupakan perangkat kerja daerah yang bertugas di bidang penyelenggara pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Guna melaksanakan fungsi dan tugasnya Diskominfo kota Palopo telah mengaplikasikan Tata Kelola Teknologi Informasi. Berdasarkan wawancara bersama pihak Kominfo Kota Palopo terkait pengelolaan *IT Governance*, ditemukan permasalahan seperti belum adanya *Standart Operating Procedure* tentang Tata Kelola Teknologi Informasi, kurangnya pemahaman personel terhadap tugasnya masing – masing dan belum adanya bisnis proses terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari penjelasan tersebut, sehingga dibutuhkan adanya pengukuran buat mengenali seberapa jauh kesiapan Diskominfo Kota Palopo buat mengimplementasikan SPBE ke dalam proses bisnisnya secara merata lewat pengukuran tingkatan kematangan (*maturity level*). Dalam melakukan pengukuran layanan *IT governance* pada Diskominfo Kota Palopo digunakan framework Cobit 5 yang memiliki cakupan yang luas untuk proses governance. Adapun domain yang digunakan yaitu DSS (*Deliver, Support and Service*). Berdasar pada hasil kajian, ada 3 sub domain dalam domain DSS tertahan di tingkatan 2 (*Managed Process*) dan 3 sub domain berada di tingkatan 3 (*Established Process*). Hasil maturity tingkatan itu diaplikasikan sebagai rujukan guna penciptaan rekomendasi. Hasil produk rekomendasi yang disusun ialah membuat SOP agar operasional berjalan lancar dan sesuai dengan proses bisnis.

Kata Kunci: Tata Kelola TI, SPBE, COBIT 5, DSS.

Abstract – The Office of Communication and Information Technology (Diskominfo) of Palopo City is a regional apparatus unit that functions as a government organizer in the field of communication and information technology. In carrying out its functions and duties, the City of Palopo Diskominfo has implemented Information Technology Governance. Based on interviews with the City of Palopo Communication and Information Technology related to IT Governance management, problems were found such as the absence of a Standard Operating Procedure on Information Technology Governance, a lack of understanding of personnel regarding their respective duties and the absence of business processes related to Electronic-Based Government Systems. From this description, it is necessary to have a measurement to find out how far the readiness of the City of Palopo Diskominfo is to implement SPBE into its overall business process through measuring the level of maturity (*maturity level*). In measuring IT governance services at Diskominfo Palopo City, the Cobit 5 framework is used, which has a broad scope for governance processes. The domain used is DSS (*Deliver, Support and Service*). The results of this study indicate that 3 sub domains in the DSS domain are still at level 2 (*Managed Process*) and 3 sub domains are at level 3 (*Established Process*). The results of the maturity level are used as a reference for making recommendations. One of the resulting recommendations is to make SOP so that operations run smoothly and in accordance with business processes.

Keywords: IT Governance, SPBE, COBIT 5, DSS

PENDAHULUAN

Penggunaan Teknologi Informasi kerap difungsikan oleh institusi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dengan teknologi informasi maka pemerintahan daerah dalam hal menyelenggarakan pemerintahan dapat

meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan tata kelola TI yang baik. IT Governance yang baik adalah kesesuaian antara penerapan TI dan tujuan bisnis instansi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Palopo merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sebagai penyelenggara pemerintahan di ranah komunikasi dan informatika. Guna melaksanakan fungsi serta tugasnya, Diskominfo Kota Palopo telah menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kominfo Kota Palopo terkait pengelolaan Tata Kelola TI masih ditemukan beberapa permasalahan seperti belum adanya Standart Operating Procedure tentang Tata Kelola Teknologi Informasi, kurangnya pemahaman personel terhadap tugasnya masing – masing, belum adanya bisnis proses terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasar pada Perpres Republik Indonesia No.95/2018 tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu buat mengimplementasikan tata Kelola pemerintahan yang jernih, efisien, jelas serta dapat dipertanggungjawabkan dan servis masyarakat yang bermutu serta dapat dipercaya. (RI, 2020). Dalam SPBE, ada 6 ruang lingkup yang menjadi indeks penilaian, yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Percepatan SPBE, Pemantauan dan evaluasi SPBE.

Dari penjelasan tersebut, sehingga dibutuhkan adanya pengukuran buat mengenali seberapa jauh kesiapan Diskominfo Kota Palopo buat mengimplementasikan SPBE ke dalam proses bisnisnya secara merata lewat pengukuran tingkatan kematangan (*maturity level*). Terdapat beberapa framework yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran layanan tata kelola TI seperti COBIT, ITIL, dan ISO/IEC 27000. Penulis memilih untuk menggunakan COBIT 5 framework.

Penelitian serupa dilakukan oleh (Majid, 2019) yang dalam penelitiannya dilakukan pengujian pada Diskominfo Probolinggo dikhususkan pada domain *Plan, Organise, Acquire and Implement*. Berdasar penelitian tersebut dihasilkan *maturity level* yang berada di tingkatan 1 artinya *performed process* yang berarti dalam menjalankan metode tata kelola teknologi informasinya Diskominfo Probolinggo masih perlu merencanakan dan menyusun ulang SOP dan standar dokumentasi terkait proses TI. Tahun berikutnya (Agung & Andry, 2018) yang dalam penelitiannya dilakukan pengukuran tingkat kapabilitas dari sistem informasi akademik sebuah universitas dengan menggunakan semua domain EDM

pada Cobit 5, dan dari hasil evaluasi tersebut rata-rata nilai terletak pada tingkat 2 yaitu *partially achieved*, artinya tata kelola dari sistem informasi akademik yang digunakan saat ini masih belum didefinisikan dengan baik sehingga menimbulkan tidak konsisten. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani et al., 2019) yang melakukan perancangan tata kelola TI SPBE pada Dinas Kominfo Kabupaten Bandung Barat pada domain EDM dan dihasilkan bahwa proses yang diprioritaskan untuk perancangan tata kelola TI SPBE adalah proses EDM02 yang berkaitan dengan investasi TI, EDM03 yang berkaitan dengan optimasi risiko, dan EDM04 yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya. Perancangan rekomendasi diusulkan dengan membuat aplikasi kinerja dimana proses yang dilakukan hanya sesuai dengan domain EDM dan MEA. Rekomendasi dilakukan agar dapat meningkatkan kondisi tata kelola TI SPBE saat ini. Kemudian, sebuah penelitian oleh (Kurniawan, 2018) yang dalam penelitiannya mengevaluasi tata kelola TI pada aplikasi E-KTP dengan menggunakan pemetaan seluruh domain pada Cobit 4.1, sehingga domain yang digunakan untuk mengevaluasi TI adalah domain yang sesuai dengan proses bisnis yang ada. Hasil dari penelitian ini menghasilkan indeks kematangan senilai 2,48 yang artinya proses tata kelola TI pada aplikasi E-KTP sudah sesuai dengan tujuan bisnis, akan tetapi masih ada beberapa yang belum berjalan sesuai dengan strategi instansi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Maskur, 2017) dengan menggunakan pemetaan pada setiap domain yang ada dalam Cobit 5. Berdasar pada kajian ini, target yang diharapkan oleh BPMPTSP Kab.Bone Bolango belum tercapai karena nilai kesenjangan yang dihasilkan dari kondisi dewasa ini.

Arah kajian ini ialah melakukan evaluasi pada proses tata kelola Teknologi Informasi di bidang infrastruktur dan manajemen sistem informatika Diskominfo Kota Palopo dengan cara menakar taraf kecakapan proses pada framework Cobit 5, sehingga nilai dari kapabilitas prosesnya dapat dijadikan acuan dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pihak Kominfo Kota Palopo. Dalam penelitian ini akan digunakan salah satu domain pada Cobit 5, yaitu DSS Domain (*Deliver, Service, and Support*). DSS Domain dipilih sebab setelah melakukan observasi domain DSS adalah domain yang paling sesuai dengan keadaan tata kelola manajemen TI di Diskominfo Kota Palopo. Model pengukuran yang diaplikasikan di COBIT 5

framework yaitu *Process Assesment Model (PAM)*. (ISACA, 2012).

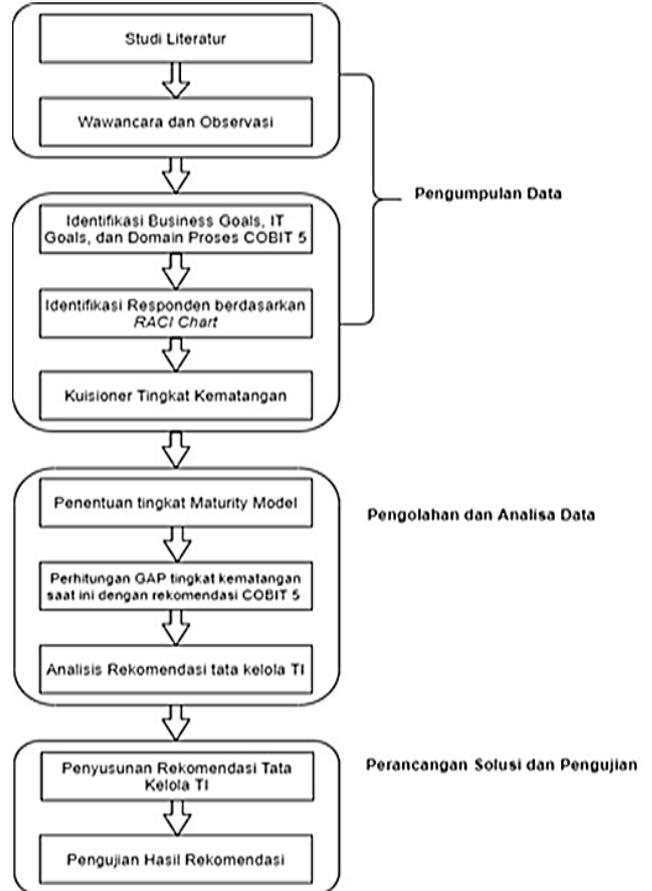
Penjelasan PAM pada COBIT 5:

1. Level 0 : Incomplete Process
Di fase ini, organisasi belum berhasil atau tak melakukan tahapan Teknologi Informasi yang semestinya dilakukan untuk mencapai tujuan proses.
2. Level 1 : Performed Process
Di fase ini, organisasi sukses dengan tepat melakukan tahapan serta tujuan Teknologi Informasi tercapai. Prosesnya perencanaan, pengawasan, dan penyesuaian.
3. Level 2 : Managed Process
Di fase ini, organisasi mengelola dengan baik tahapan perencanaan, evaluasi, serta penyesuaian dalam melakukan proses Teknologi Informasi dan mencapai tujuannya.
4. Level 3 : Established Process
Di fase ini, organisasi telah mempunyai standar untuk tahapan-tahapan Teknologi Informasi yang diberlakukan di ranah organisasi tersebut.
5. Level 4 : Predictable Process
Di fase ini, organisasi menentukan batasan untuk semua proses Teknologi Informasi untuk mencapai hasil.
6. Level 5 : Optimising Process
Di fase ini, organisasi memprediksi proses dan melakukan peningkatan agar tujuan bisnis saat ini sesuai dengan tujuan pekerjaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo khususnya di bidang Infrastruktur dan Manajemen Informatika. Metode deskriptif diaplikasikan pada kajian ini. Metode deskriptif ialah suatu cara yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan cara penggambaran subjek atau objek dari penelitian, dimana objeknya dapat berupa individu, sekelompok orang, lembaga dan sebagainya dengan berdasarkan kejadian sebenarnya. (Nurwega, 2015). “Penelitian deskriptif ada beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut: Penelitian deskriptif dengan metode survei (survey studies), Penelitian dengan metode kesinambungan, Penelitian dengan studi kasus (case studies), penelitian perkembangan (developmental studies), penelitian tindak lanjut (follow-up studies), penelitian deskriptif analisis pekerjaan dan aktivitas dokumen (documentary

studies), dan penelitian korelasional (correlation studies)”. Pada kajian ini digunakan penelitian deskriptif studi kasus. Tahapan yang diaplikasikan dalam kajian ini adalah sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1 Alur Penelitian

Pada alur penelitian ini yang digambarkan pada Gambar 1 adalah mengumpulkan studi literatur tentang semua yang berkaitan dengan framework yang akan digunakan yaitu Cobit 5 khususnya pada domain DSS berupa jurnal, prosiding, artikel dan observasi langsung di Dinas Kominfo Palopo.

Tabel 1 Sub Domain DSS

Sub Domain	Proses Domain
DSS01	<i>Manage Operations</i> (Mengelola Operasi)
DSS02	<i>Manage Service Requests and Incidents</i> (Mengelola Permintaan Layanan dan Mengelola Insiden)
DSS03	<i>Manage Problems</i> (Mengelola Masalah)
DSS04	<i>Manage Continuity</i> (Mengelola Keberlanjutan)
DSS05	<i>Manage Security Services</i> (Mengelola Layanan Keamanan)
DSS06	<i>Manage Business Process Controls</i> (Mengelola Kontrol - kontrol Proses Bisnis)

Dari Tabel 1, DSS memiliki 6 sub domain. Kemudian, tahapan yang selanjutnya adalah

identifikasi tujuan bisnis dengan IT goals. Kemudian mengidentifikasi responden dengan melakukan pemetaan RACI Chart. Diagram RACI ialah bentuk pemetaan antara sumber daya dengan aktivitas di dalam tiap proses yang ada. Untuk melakukan penilaian pada domain Governance IT dan Management IT adalah dengan cara pemetaan antara tujuan sub dan SDM perusahaan untuk sistem informasi (ISACA, 2012). RACI ialah kependekan dari R (Responsible), A (Accountable), C (Consulted), dan I (Informed). Responsible artinya Tanggung jawab, orang yang berhak menjelaskan tugas yang ada dan bertanggung jawab sampai tugas selesai. Accountable artinya akuntabel, orang yang berhak dalam mengambil keputusan, Consulted artinya konsultasi, pemangku kepentingan utama yang harus dilibatkan dalam semua kegiatan. Informed: Informasi, orang yang membutuhkan atau siap untuk menerima informasi. (Wiraniagara & Wijaya, 2019)

Setelah hasil pemetaan dari RACI Chart didapatkan, maka langkah selanjutnya membuat pertanyaan kuisisioner yang sesuai dengan Domain DSS. Kemudian, dilakukan perhitungan maturity level dari hasil kuisisioner untuk mendapatkan level kematangan setiap sub domain proses. Selanjutnya, menghitung GAP (kesenjangan) dari keadaan saat ini dengan target yang diharapkan, sehingga dari hasil GAP tersebut dapat digunakan untuk menyusun hasil rekomendasi untuk Diskominfo Kota Palopo. Dan yang terakhir ialah pembuatan saran dan kesimpulan dari hasil kajian yang dilaksanakan.

Analisis sistem

Pemetaan Enterprise Goal dengan Tujuan Bisnis

Untuk menghubungkan antara kebutuhan enterprise goals dan tujuan bisnis audit, maka dilakukan tahapan pemetaan yang mengacu pada COBIT 5 framework dengan menggunakan penilaian yang terangkum pada Balance Scorecard (BSC) yang difungsikan sebagai alat pengukur aktivitas operasional suatu bisnis.

Keterangan pada Tabel 2 adalah apabila tidak ada satupun nilai P (Primer) pada suatu Enterprise Goals, maka Enterprise Goals tersebut tidak akan digunakan atau tereliminasi.

Hasil dari pemetaan Enterprise Goals dengan tujuan bisnis pada Tabel 2 adalah EG 1, EG 3, EG 4, EG 6, EG 7, EG 8, EG 9, EG 11, EG 13, EG 14, EG 15, dan EG 17 memenuhi aspek penilaian pada Balance Scorecard (BSC), sedangkan EG2, EG5, EG 10, EG 12,

dan EG 16 tidak digunakan karena tidak memenuhi aspek penilaian.

Pemetaan IT-Related Goals dengan Enterprise Goals

Untuk mengidentifikasi kesesuaian antara IT-Related Goals dengan kebutuhan maka hasil dari pemetaan Enterprise Goals dengan tujuan bisnis pada Tabel 2, selanjutnya dipetakan terhadap IT-Related Goals.

Tabel 2 Pemetaan Enterprise Goal dengan Tujuan Bisnis

BSC Dimension	Enterprise Goal	Relation to Governance Objectives		
		Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Mendukung program E-governance di lingkungan pemerintah Palopo	Peningkatan kualitas layanan bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informatika
Financial	1 Stakeholder value of business investments	P	P	P
	2 Portfolio of competitive product and services	S		
	3 Managed business risk (safeguarding of assets)		P	P
	4 Compliance with external laws and regulations	P	P	P
	5 Financial transparency		P	P
	6 Customer - oriented service culture	P	P	P
	7 Business service continuity and availability		P	P
Customer	8 Agile responses to a changing business environment	P	S	S
	9 Information - based strategic decision making		P	P
	10 Optimisation of service delivery cost	P	S	
Internal	11 Optimisation of business process functionality	P	P	P
	12 Optimisation of business process cost		P	
	13 Managed business change programmers	P	S	S
	14 Operational and staff productivity	S	P	S
	15 Compliance with internal policies	P	S	P
Learning & Growth	16 Skilled and motivated people		P	S
	17 Product and business innovation culture	P	S	S

Tabel 3 Pemetaan IT-Related Goals dengan Enterprise Goals

IT-Related Goals	Enterprise Goals												
Goals	EG1	EG3	EG4	EG6	EG7	EG8	EG9	EG11	EG13	EG14	EG15	EG17	
ITrG1	P	S		P	S	P	P	P	P				
ITrG2		S	P								P		
ITrG3	P	S				S	S	S	P			S	
ITrG4		P	S		P	S			S		S		
ITrG5	P			S		S	S	S	P	S		P	
ITrG6	S	S		P			S	P	P				
ITrG7	P	S	S	P	S	P	S		P		S	S	
ITrG8	S	S		S	S		S	P	S		P	S	
ITrG9	S	S		S		P		P	S	S		P	
ITrG10		P	P		P						P		
ITrG11	P					S		P	S	P	S	S	
ITrG12	S	S		S		S		P	S	S		S	
ITrG13	P	S		S					P				
ITrG14	S	S	S		P		P	S					
ITrG15		S	S								P		
ITrG16	S	P		S		S				P		S	
ITrG17	S			S		P	S	S	S			P	

Dari hasil pemetaan tabel 3 diatas adalah ITrG-1 sampai ITrG-17 memenuhi aspek penilaian sehingga

ItrG-1 sampai ItrG-17 yang dipilih untuk dilakukan pemetaan selanjutnya terhadap proses kontrol pada sub domain COBIT 5.

Pemetaan Process Control dengan IT-Related Goals

Untuk menentukan hubungan antara proses kontrol dan tujuan perusahaan terkait implementasi TI. Maka selanjutnya dilakukan pemetaan Process Control pada DSS dengan IT-Related goals.

Tabel 4 Pemetaan Process Control dengan IT Related Goals

Cobit Process (DSS)	IT-Related Goals																
	ItrG1	ItrG2	ItrG3	ItrG4	ItrG5	ItrG6	ItrG7	ItrG8	ItrG9	ItrG10	ItrG11	ItrG12	ItrG13	ItrG14	ItrG15	ItrG16	ItrG17
DSS01	S		P	S		P	S	S	S	P				S	S	S	S
DSS02				P		P	S		S					S	S		S
DSS03		S		P	S	P	S	S		P	S			P	S		S
DSS04	S	S		P	S	P	S	S	S	S	S			P	S	S	S
DSS05	S	P		P		S	S		P	S	S			S	S		
DSS06		S		P		P	S		S	S	S			S	S	S	S

Hasil pemetaan dari tahapan COBIT 5 dengan IT Related goals pada tabel 4 menunjukkan bahwa Primary (P) merupakan item yang mempunyai prioritas tinggi, sedangkan secondary (S) merupakan item mempunyai prioritas yang rendah. Sehingga, ruang lingkup proses audit TI pada Diskominfo Kota Palopo menggunakan semua tahanan dalam domain DSS.

Pemetaan RACI Chart

Untuk menentukan masing – masing proses dan sub proses dalam domain DSS, maka dilakukan perencanaan karakterisasi yang mengacu pada diagram RACI sebagai alat estimasi yang digunakan untuk mempermudah dalam mengenali tugas dan kewajiban pegawai. (Oktianatasari, 2017)

Tabel 5 Hasil Pemetaan RACI Chart

No	Peran	Jabatan Responden
1	CIO (Chief of Information Officer)	Kepala Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informatika
2	CA (Chief Architect)	Kepala Seksi Perangkat Keras
3	HO (Head Operation)	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan E-Government
4	HD (Head IT Development)	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Teknologi Informatika

Berdasarkan tabel 5 maka terpilih 4 responden untuk mengisi kuisioner audit yang akan dilakukan di Diskominfo Kota Palopo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang didapat dari kuisioner yang disebar ke 4 responden yang telah dipilih pada

RACI Chart, dengan menggunakan maturity level diperoleh hasil maturity level.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 6, Maturity Level (tingkat kematangan) tata kelola teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo bisa ditarik informasi bahwa tiap sub domain sudah direalisasikan guna menjangkau tujuan bisnis dari Diskominfo Kota Palopo. Berikut ini penjelasan rinci perihal sub domain DSS yang ada.

Tabel 6 Maturity Level

Process	Total Responden	Indeks Tingkat Kematangan Responden	Indeks Tingkat Kematangan Saat Ini
DSS01	4	2.32	2
DSS02	4	3.07	3
DSS03	4	2.43	2
DSS04	4	2.79	3
DSS05	4	3.05	3
DSS06	4	2.41	2
Rata - Rata		2.68	3

1. DSS01 (Manage Operation)

Di sub domain ini, hasil dari perhitungan maturity level ada di level 2 yaitu Managed process yang dalam melakukan prosedur operasiol Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Diskominfo Kota Palopo belum memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) melainkan masih dalam tahapan pengelolaan proses.

2. DSS02 (Manage Service Request and Incident)

Pada sub domain ini, hasil dari perhitungan maturity level ada di level 2 Managed process yang berarti belum adanya SOP yang jelas untuk proses permintaan layanan insiden.

3. DSS03 (Manage Problems)

Pada sub domain ini, hasil dari perhitungan maturity level ada di tingkatan 2 yakni Managed process yang berarti Diskominfo Kota Palopo telah mengelola masalah TI dengan baik dengan melakukan identifikasi masalah dan mengatasi masalah yang ada, tetapi dalam melakukan hal tersebut belum adanya dokumentasi.

4. DSS04 (Manage Continuity)

Pada sub domain ini, hasil dari perhitungan maturity level pada sub domain ini ada di level 3 yaitu Established Process yang berarti pihak Diskominfo Kota Palopo memiliki SOP yang jelas untuk mengatur operasional, seperti melakukan backup data secara berkala, melakukan maintainance, melakukan evaluasi

5. DSS05 (Manage Security Service)

Pada sub domain ini, hasil dari perhitungan maturity level pada sub domain ini ada di level 3 yaitu Established Process yang berarti pihak Diskominfo Kota Palopo memiliki SOP yang jelas untuk mengatur operasional, seperti melakukan backup data secara berkala, melakukan maintenance, melakukan evaluasi secara berkala terkait pengaplikasian sistem yang ada.

6. DSS06 (Manage Business Process Control)

Pada sub domain ini, hasil dari perhitungan maturity level ada di level 2 yaitu Managed process yang berarti pihak Diskominfo Kota Palopo sudah melakukan pengklasifikasian pembagian hak akses berdasarkan peran dan tanggung jawab akan tetapi belum melakukan evaluasi secara berkala pada aktivitas kontrol proses.

GAP MATURITY LEVEL

Lakukan analisis GAP setelah mengukur tingkat kematangan. Analisis ini diaplikasikan guna memadankan taraf kematangan saat ini dengan taraf kematangan yang diharapkan. Hasilnya akan digunakan untuk menyarankan perbaikan berupa rekomendasi langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan tata kelola TI.

Tabel 7 GAP Maturity Level (Tingkat Kematangan)

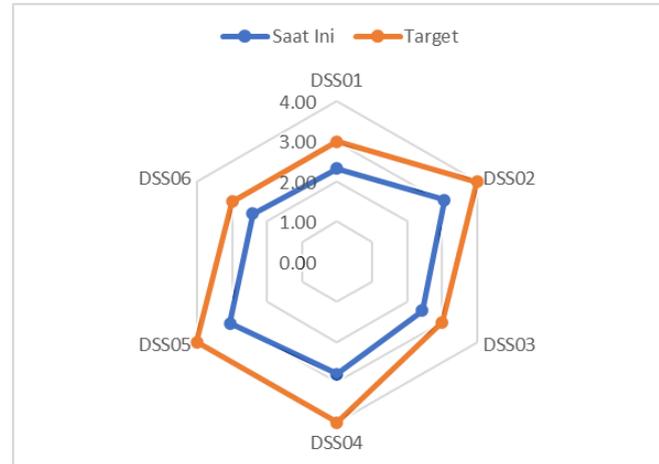
Sub Domain Proses	Tingkat Kematangan	Tingkat Kematangan yang diharapkan	GAP
DSS01	2.32	3.00	0.68
DSS02	3.07	4.00	0.93
DSS03	2.43	3.00	0.57
DSS04	2.79	4.00	1.21
DSS05	3.05	4.00	0.95
DSS06	2.41	3.00	0.59

Tabel 7 adalah hasil kesenjangan dari setiap domain dalam domain DSS (Deliver, Support and Service) dan analisis perbedaannya adalah antara 0.57-1.21. Oleh karena itu, Diskominfo Kota Palopo perlu melakukan beberapa kegiatan untuk mencapai nilai GAP yang berpedoman pada COBIT 5, seperti merumuskan dan membahas pelaksanaan SPBE dan SOP manajemen risiko, pertemuan sumber daya IT, dan pelatihan sumber daya manusia.

Dapat dilihat pada Gambar 2 bentuk Spider Chart analisis kesenjangan dari hasil perhitungan taraf kematangan saat ini dengan taraf kematangan yang

diinginkan. Rincian rekomendasi yang diusulkan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo ialah:

1. Mencipta Standar Operasional Prosedur (SOP) agar operasional yang berjalan memiliki acuan dan standar sehingga operasional dapat berjalan dengan baik, seperti SOP tentang perawatan sistem, SOP tentang penggunaan komputer dan internet agar keamanan informasi tetap terjaga.



Gambar 2 Spider Chart Analisis GAP

2. Dinas Kominfo Kota Palopo perlu menentukan kebijakan – kebijakan terkait proses bisnis secara lebih terperinci dan melakukan evaluasi terhadap proses bisnis yang dijalankan.
3. Perlu dilakukan monitoring berkala sehingga kondisi operasional dapat diketahui dengan jelas. Dan juga monitoring secara berkala bagaimana sistem berjalan.
4. Perlu dilakukan pelatihan Teknologi Informasi untuk semua karyawan yang ada di Diskominfo Kota Palopo.
5. Perlu diadakan dokumentasi pada saat mengatasi masalah yang terjadi, sehingga pada saat terjadi kesalahan atau masalah yang sama dapat diatasi secepatnya.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, tingkat kematangan atau maturity level pada Dinas Kominfo Kota Palopo Berisi ringkasan hasil penelitian dan rekomendasi dengan hasil penelitian baik pada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun inovasi di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Terdapat 3 proses pada domain DSS COBIT 5 yang memiliki nilai maturity level pada level 2 (Managed Process) yaitu DSS01, DSS03, DSS06, serta terdapat 3 proses pada domain DSS COBIT 5 yang memiliki nilai

maturity level pada level 3 (Established Process) (Proses stabil) yaitu DSS02, DSS04, DSS05.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) agar operasional yang berjalan memiliki standar dan acuan sehingga operasional berjalan dengan baik, seperti SOP tentang perawatan sistem, SOP tentang penggunaan komputer dan internet agar keamanan informasi tetap terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih ke semua pihak yang menopang berjalannya penelitian ini, khususnya kepada keluarga untuk pengertian dan perhatian selama penulis mengerjakan artikel ini. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staff Diskominfo Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, H., & Andry, J. F. (2018). Audit Sistem Informasi Akademik Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5 pada Domain EDM pada Universitas XYZ. *JBASE - Journal of Business and Audit Information Systems*, 1(1), 40–51. <https://doi.org/10.30813/v1i1.1143>
- Cahyani, W. S., Darmawan, I., T, M., T, R. M. S., & A, M. B. (2019). *Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain EDM Cobit 5 (Studi Kasus: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat) IT Governance Design for E-Government on EDM Domain Cobit 5 (Case . 6(2), 8400–8406.*
- ISACA. (2012). Enabling Processes. In *Cobit 5*.
- Kurniawan, D. T. (2018). Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi E-Ktp Menggunakan Framework Cobit (Studi Kasus : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor). *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8(2), 123. <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080203>
- Majid, S. (2019). *Audit Tata Kelola TI Diskominfo Probolinggo* (Vol. 2, Issue 9, pp. 3425–3432). <https://doi.org/10.31219/osf.io/yuehf>
- Maskur. (2017). Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Di BPMPTSP Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango dipetakan untuk. *IT Governance Implementation Using COBIT 5 Framework in Bone Bolango BPMPTSP*, 8(2), 109–126.
- Nurwega, D. (2015). *Pembinaan Karakter Antikorupsi Siswa pada Lingkungan Boarding School*.
- Okianatasari, H. (2017). Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dengan Kerangka Kerja Cobit 5. *Tesis*, 189. <http://repository.its.ac.id/46592/>
- RI, K. S. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 1, 110.
- Wiraniagara, A., & Wijaya, A. F. (2019). Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Domain Deliver Support and Service (Studi Kasus: Yayasan Eka Tjipta). *Sebatik*, 23(2), 663–671. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.831>

Halaman ini sengaja dikosongkan